

---

## Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Ade Lulu Islamaya<sup>1</sup>, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
E-mail: islamayaade@gmail.com

---

### Article History:

Received: 27 Februari 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 27 Maret 2026

**Keywords:** Pendidikan,  
Keterbatasan Ekonomi,  
Beasiswa

**Abstract:** Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat dilakukan dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi salah satu kunci menciptakan sumber daya manusia yang dinamis, produktif, serta mumpuni baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Keterbatasan ekonomi menjadi hambatan dalam upaya mendapatkan pendidikan. Kendala dalam segi pembiayaan menimbulkan adanya pemisah antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang tidak mampu. Setiap individu memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas diri, mengasah kemampuan berpikir yang rasional serta meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi guna mewujudkan terpenuhinya kebutuhan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipatif, wawancara, serta studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal disebabkan belum tersedianya inovasi digital dalam proses administrasi.

---

### PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang unggul dalam hal ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi tantangan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia mengalami bonus demografi sehingga mayoritas penduduk berada di usia produktif. Pemanfaatan penduduk usia produktif dapat terlaksana dengan optimal melalui peningkatan akses untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurut Octavia & Ramadhan (2025), Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sebanyak 30,85% penduduk Indonesia berusia diatas 15 tahun memiliki ijazah SMA/ sederajat. Angka yang lebih besar menunjukkan bahwa penduduk Indonesia

---

berusia diatas 15 tahun hanya memiliki ijazah SD dan SMP. Secara nasional, dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia berusia diatas 15 tahun sebanyak 10,20% menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Angka tersebut menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Desember 2024, angka partisipasi kasar perguruan tinggi untuk penduduk yang berusia 19-23 tahun tercatat sebesar 32%. Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti Malaysia dengan capaian APK sebesar 43%, Thailand dengan capaian APK sebesar 49,29%, kemudian, Singapura dengan APK mencapai 91,09%, Capaian APK Indonesia masih tergolong sangat rendah.

Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi dipengaruhi oleh faktor keterbatasan ekonomi. Di tahun 2020, terjadinya pandemi covid-19 mempengaruhi perekonomian masyarakat Indonesia secara drastis. Banyaknya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan pasca pandemi kondisi perekonomian belum sepenuhnya terkendali akibat dari terjadinya krisis ekonomi global. Cita-cita Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 menghadapi tantangan kesenjangan pendidikan. Pentingnya ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dalam keilmuan, keterampilan, dan daya saing akan berperan signifikan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan tinggi dinilai sebagai tingkatan pendidikan yang mampu berperan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Purnamasari & Ardiansyah (2025) di negara-negara maju antara tingkat partisipasi menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan kemajuan perekonomian masyarakatnya menunjukkan korelasi yang positif. Oleh karenanya, dalam dunia kerja terjadi peningkatan kebutuhan tenaga kerja terdidik yang memiliki kompetensi. Pendidikan tinggi bukan hanya sebagai investasi yang memberikan manfaat individual, namun juga akan berdampak terhadap kemajuan bangsa.

Capaian penduduk yang menempuh pendidikan tinggi berbeda-beda setiap provinsi. Berdasarkan data dari BPS angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi dengan angka capaian tertinggi oleh DI. Yogyakarta sebesar 73,90% kemudian Provinsi Maluku sebesar 47,91%. Sedangkan Provinsi Jawa Timur mencapai APK sebesar 31,85%. Meskipun capaian APK Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Timur belum mencapai target ideal APK 100%, angka tersebut menunjukkan ketersediaan akses pendidikan tinggi di Jawa Timur cukup baik.

Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu bagian dari Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam wilayah Gerbangkertasusila. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Penataan ruang kawasan perkotaan Gerbangkertasusila bertujuan untuk mendukung peningkatan fungsi perkotaan inti dengan sekitarnya sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penataan yang direncanakan tersebut akan berdampak positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja sehingga kebutuhan hidup akan terpenuhi dengan baik serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Mojokerto tengah berupaya meningkatkan kesadaran akan pendidikan tinggi di masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pemerataan pendidikan di Kabupaten Mojokerto salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi. Faktor kondisi sosial ekonomi menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan tinggi penduduk Kabupaten Mojokerto. Keterbatasan ekonomi menjadi hambatan untuk memperoleh pendidikan di perguruan tinggi. Berdasarkan data BPS 2024, pada tahun 2009-2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sangat fluktuatif. Meningkatnya angka kemiskinan terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 13,24%

---

dan angka kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 9,71%. Namun peningkatan angka kemiskinan kembali terjadi di tahun 2023 sebesar 9,8% (Ainaya & Imaningsih, 2025). Dalam hal ini, Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, tingkat kemiskinan yang fluktuatif, dan ketidakmerataan akses pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kesempatan diterimanya individu sebagai tenaga kerja. Dengan berkembangnya industri di Kabupaten Mojokerto, maka perlu mewujudkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam segi kompetensi dan keahlian.

Menurut Komalasari dkk (2024), sektor industri menyerap tenaga kerja berdasarkan pada kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja. Salah satunya dapat diukur dari tingkat pendidikan karena pendidikan merupakan modal untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memegang peranan penting dalam memfasilitasi pendidikan tinggi bagi penduduk Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan bantuan sosial berupa beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi. Program pemberian beasiswa pendidikan di perguruan tinggi bagi penduduk Kabupaten Mojokerto diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengimplementasikan Catur Abipraya Mubarak yaitu visi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

## **LANDASAN TEORI**

Landasan teori merupakan dasar pemikiran *Foundation of Thought* yakni berfungsi sebagai pijakan ilmiah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan argumen dalam penelitiannya (Nursulis & Muspawi, 2024). Adanya landasan teori memungkinkan penelitian yang dilakukan terhubung secara akademik dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Hanifah dkk, 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa landasan teori merupakan acuan atau dasar yang digunakan sebagai pijakan ilmiah karena penelitian yang dilakukan dapat terhubung secara akademik dengan penelitian-penelitian terdahulu.

### **A. Penelitian yang relevan**

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan pembahasan. Adanya penelitian terdahulu, berfungsi sebagai referensi bagi peneliti untuk penelitian yang dilakukannya. Penelitian mengenai Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, Y. P. (2021), dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 10 Issue 1 (2021) yang berjudul "Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau". Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi program pemberian beasiswa daerah tersebut dari komunikasi belum terlaksana secara optimal, kurangnya sosialisasi menjadikan mahasiswa kurang memahami terkait peraturan bupati yang mendasari program tersebut. Dari sisi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah memadai, begitu juga dari sisi disposisi telah dibentuk tim yang bertugas melaksanakan program pemberian beasiswa. Kemudian dari sisi struktur birokrasi, pelaksana program sudah melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur. Faktor penghambat program pemberian beasiswa tersebut yaitu keterlambatan penyaluran dana dari donatur kepada

---

pelaksana program sehingga menghambat proses penyaluran beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024) dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor 4, November 2024 yang berjudul "Implementasi Program Beasiswa TI Bupati (BESTI) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung". Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi program beasiswa TI Bupati di Kabupaten Bandung dari sisi komunikasi antar instansi telah berjalan dengan optimal, namun dari sisi sumber daya mengalami kendala anggaran mengakibatkan staf kurang optimal. Kemudian dari sisi disposisi sudah cukup optimal namun terdapat kendala dalam hal ketertiban mahasiswa ketika mengumpulkan dokumen untuk beasiswa. Dari sisi struktur birokrasi, mengalami kendala kurangnya staf kepengurusan sehingga untuk pelaksanaan program selanjutnya dapat dibentuk tim khusus untuk melaksanakan program.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaufa, R. (2023) dalam Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol. 12 (2) yang berjudul "Implementasi Program Beasiswa Gunungkidul Cerdas Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunungkidul". Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi program beasiswa tersebut sudah efektif. Didukung oleh koordinasi yang intens, sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya, serta sarana prasarana yang memadai. Hambatan dalam implementasi program yaitu terbatasnya kuota penerima beasiswa, nominal beasiswa yang diberikan kurang mencukupi, dan pencairan beasiswa yang membutuhkan waktu lama.

Terdapat beberapa persamaan penelitian ini dengan judul "Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto" dengan penelitian yang relevan di atas, sebagai berikut :

1. Persamaan dengan penelitian Utami, Y. P. (2021), Widyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024), dan Mustaufa, R. (2023) yaitu topik yang dikaji mengenai beasiswa pemerintah daerah.
2. Persamaan dengan penelitian Widyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024) dan Mustaufa, R. (2023) yaitu sumber daya anggaran dalam pemberian beasiswa bersumber dari APBD.
3. Persamaan dengan penelitian Widyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024), yaitu pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto sedangkan pemberian beasiswa TI Bupati (BESTI) untuk mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Bandung.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan di atas, sebagai berikut :

1. Perbedaan dengan penelitian Utami, Y. P. (2021), Widyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024), dan Mustaufa, R. (2023) yaitu lokasi penelitian.
  2. Perbedaan dengan penelitian Mustaufa, R. (2023) yaitu pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto diperuntukkan bagi masyarakat miskin berprestasi jenjang Perguruan Tinggi sedangkan pemberian beasiswa Gunungkidul Cerdas Kabupaten Gunungkidul diperuntukkan bagi siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Pertama.
  3. Perbedaan dengan penelitian Utami, Y. P. (2021) yaitu anggaran pemberian
-

beasiswa berasal dari donatur yaitu perusahaan-perusahaan.

Dapat disimpulkan, penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti. Penelitian ini dilakukan tanpa maksud tindakan duplikasi pada penelitian terdahulu yang relevan, karena telah dipastikan terdapat beberapa perbedaan.

## **B. Kajian Teori**

Teori merupakan sekumpulan proposisi yang terhubung serta dan dapat diuji secara empiris (Marliyah, 2021). Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan oleh George C Edward III. Teori tersebut berfokus pada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut definisi dari setiap indikator teori tersebut.

1. Komunikasi merupakan suatu proses melibatkan sejumlah individu dalam penyampaian informasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan isi komunikasi, dan penyampaian informasi secara konsisten.
2. Sumber daya yaitu tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni sebagai pelaksana program serta tercukupinya sumber daya anggaran untuk pemberian beasiswa.
3. Disposisi merupakan sikap yang menunjukkan penerimaan, pemahaman, dan keyakinan terhadap manfaat kebijakan tersebut (Maksum & Rahaju, 2018). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.
4. Struktur birokrasi merupakan struktural ataupun hierarki pelaksana program termasuk standar operasional prosedur dan fragmentasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan program pemberian beasiswa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan kebenaran akan suatu studi yang dianalisis, diawali dengan terbentuknya rumusan masalah untuk menciptakan hipotesis atau dugaan awal, menganalisis persepsi penelitian terdahulu hingga kemudian penelitian diolah menjadi kesimpulan (Sahir,2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan peristiwa dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan membandingkan data hasil penelitian (Waruwu,2023). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumen.

Observasi partisipatif menjadi metode efektif dalam mengumpulkan data, peneliti terlibat langsung untuk mengamati aktivitas, proses, dan hasil dari program pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terkait tahapan dalam implementasi program kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi program tersebut dalam hal ini terkait dengan Kesejahteraan Sosial yaitu Ibu Six Baroroh Barit, S.H. di tempat kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto. Wawancara semi struktur dilakukan oleh peneliti kepada penerima beasiswa yakni mahasiswa yang mendaftar bidang umum dan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri serta mahasiswa yang mendaftar bidang hafalan Al-Quran dan menempuh pendidikan di

---

Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Metode studi dokumen dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Adapun jenis dokumen yang digunakan antara lain dokumen sekunder, dokumen publik, serta dokumen pribadi. Dokumen sekunder didapat dari artikel berita di website resmi Kabupaten Mojokerto serta laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh penerima beasiswa. Peneliti menggunakan dokumen publik meliputi arsip surat keputusan Bupati Mojokerto tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial berupa uang dalam rangka pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta tahun anggaran 2025. Adapun dokumen pribadi yang didapat peneliti berupa foto kegiatan penyerahan secara simbolis dan foto kegiatan penyerahan laporan pertanggungjawaban oleh penerima beasiswa kepada tim pelaksana program yakni Sub Kesejahteraan Sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman, size 12)**

### **Gambaran Umum Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto**

Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari visi pembangunan yang dirumuskan dalam Catur Abipraya Mubarak. Nama tersebut diambil dari gabungan bahasa Sansekerta dengan bahasa arab. Catur berarti empat, Abipraya berarti cita-cita luhur, dan Mubarak yang merupakan akronim dari Muhammad Albarra (Bupati Mojokerto) dan Muhammad Rizal Octavian (Wakil Bupati Mojokerto) serta dalam bahasa arab Mubarak diartikan sebagai bertabur keberkahan (ori/ris, 2025). Visi pembangunan dalam Catur Abipraya Mubarak terdapat empat pilar yaitu :

1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan menjaga ketentraman bersama;
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Membangkitkan kemandirian ekonomi bagi sektor industri, koperasi dan usaha mikro, serta BUMDes guna terwujudnya keluarga yang sejahtera; dan
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan ketersediaan akses sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Pemberian Beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi jenjang perguruan tinggi termasuk dalam pilar kedua misi pembangunan Pemerintah kabupaten Mojokerto. Dasar pelaksanaan program pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi jenjang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kabupaten Mojokerto tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa bagi Masyarakat Miskin Berprestasi. Di tahun 2025, Bupati Mojokerto memberikan bantuan sosial beasiswa dengan total nilai Rp1.012.500.000 (satu miliar dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025.

Total penerima beasiswa tersebut sebanyak 120 mahasiswa, tercatat sebanyak 50 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yakni Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kemudian sebanyak 70 mahasiswa berasal dari perguruan tinggi swasta di Kabupaten Mojokerto yakni STIES Riyadlul Jannah Pacet, IAI Uluwiyah Mojosari, STAI Nurul Islam Pungging, STIE Darul Falah Mojosari, STITNU Al-Hikmah Trowulan, Universitas KH. Abdul Chalim Pacet, STAI Majma'al Bahrain Jatirejo, dan STAI Sabilul Muttaqin Pungging. Adapun seleksi penerima beasiswa di perguruan tinggi negeri didasarkan pada prestasi, kemudian di perguruan tinggi swasta didasarkan pada hafalan Al-Quran.

---

Nominal yang diberikan sebesar Rp10.000.000 bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri, kemudian bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi swasta mendapat beasiswa dengan nominal sebesar Rp25.000.000 untuk perkuliahan selama 8 semester. Program pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto direalisasikan sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto memfasilitasi pendidikan di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dengan pemberian beasiswa tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap dapat meringankan biaya pendidikan mahasiswa berprestasi namun terkendala biaya karena keterbatasan ekonomi.

### **Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto merujuk pada Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edward III**

Indikator yang digunakan dalam teori tersebut antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan indikator penting yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan publik, keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi (Agustino,2006). Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *communicatio* yang berarti sama. Adapun pengertian komunikasi secara terminologis yakni penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain (Nurhadi & Kurniawan, 2017). Dalam pengertian secara etimologis, dapat diartikan bahwasanya komunikasi berlangsung oleh individu yang memiliki pandangan dan pemahaman yang sama terkait suatu hal. Kemudian secara terminologis, dapat diartikan bahwasanya komunikasi melibatkan sejumlah individu dalam proses menyampaikan suatu pernyataan atau informasi. Adanya komunikasi yang efektif menjadikan informasi tersampaikan secara transparan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan sehingga tujuan kebijakan tercapai dengan tepat.

Terkait dengan implementasi program pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto, komunikasi memegang peranan penting dalam koordinasi antara dinas terkait, kampus mitra, serta penerima beasiswa. Komunikasi berfungsi untuk mengumumkan terkait program pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kriteria pendaftar beasiswa, berkas persyaratan, prosedur, dan lini masa beasiswa. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam mensosialisasikan program kepada siswa-siswi yang menempuh pendidikan kelas XII di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Mojokerto. Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berperan mensosialisasikan program kepada siswa-siswi yang menempuh pendidikan kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Mojokerto. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berperan sebagai penyedia Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan validasi berdasarkan DTSEN dapat dipastikan bahwa penerima beasiswa berasal dari keluarga kurang mampu sehingga beasiswa yang diberikan tepat sasaran. Kemudian perguruan tinggi swasta yang berada di Kabupaten Mojokerto turut serta mensosialisasikan program beasiswa bidang hafalan Al-Qur'an kepada mahasiswanya. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto juga bekerja sama dengan Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz untuk membantu pelaksanaan tes hafalan Al-Quran mahasiswa pendaftar beasiswa bidang hafalan Al-Quran. Serta bekerja sama dengan Bank Jatim dalam penyediaan rekening bank yang digunakan untuk menyalurkan dana ke penerima beasiswa.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam implementasi program beasiswa, yakni transmisi, kejelasan isi komunikasi, dan konsistensi dalam

---

menyampaikan informasi.

a. Transmisi

Transmisi dalam konteks implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu proses menyebarkan informasi kepada pelaksana program. Bupati Mojokerto memberikan arahan dalam merealisasikan program pemberian beasiswa melalui Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/250/HK/416-012/2025 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa bagi Masyarakat Miskin Berprestasi Tahun Anggaran 2025. Tim verifikasi terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Pembentukan tim verifikasi dilakukan untuk melaksanakan tugas memverifikasi data penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diusulkan lembaga pendidikan sesuai tingkatan sekolah.

Penyampaian informasi terkait proses verifikasi, hasil verifikasi, pembuatan berita acara dilakukan melalui pertemuan langsung atau rapat. Pentingnya menjalin komunikasi secara tatap muka guna menciptakan diskusi yang dapat mempercepat pengambilan solusi dalam menindaklanjuti masalah atau kendala yang terjadi serta memungkinkan interaksi dua arah sehingga dapat meminimalisir adanya kegagalan dalam memahami informasi.

Gambar 1. Sosialisasi Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada mahasiswa STITNU Al-Hikmah Kecamatan Trowulan



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, 2025

Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program kepada penerima manfaat dilakukan dengan dua metode yakni komunikasi luring dan komunikasi daring. Penyampaian informasi terkait beasiswa disampaikan oleh pelaksana program melalui kegiatan sosialisasi secara tatap muka di perguruan tinggi. Tim pelaksana program juga menyediakan akses untuk komunikasi dua arah melalui grup WhatsApp sehingga penerima beasiswa dapat dengan mudah menyampaikan kendala yang dialami saat proses pencairan dana maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban.

b. Kejelasan isi komunikasi

Kejelasan didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa besar pemahaman mengenai program baik tujuan, tahapan, dan target yang diharapkan dipahami secara detail oleh seluruh pihak yang terkait sehingga dapat dipastikan setiap pihak yang terlibat memahami peranan dan kontribusinya untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Dasar hukum pelaksanaan program telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa bagi Masyarakat Miskin Berprestasi, Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2025 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Juli 2025 nomor 800/609/416-204/2025 perihal surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi bidang umum dan hafalan Al-Quran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dasar hukum tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merealisasikan program pemberian beasiswa. Adanya regulasi yang jelas dan lengkap dengan aturan turunan untuk teknis pelaksanaan pemberian beasiswa, mendukung pelaksanaan program dengan optimal karena pelaksana kegiatan telah memahami substansi program tersebut. Kejelasan informasi mengenai program juga dirasakan oleh penerima manfaat, tim pelaksana program memberikan informasi secara detail dalam powerpoint. Kemudian powerpoint tersebut dibagikan di grup WhatsApp penerima beasiswa sehingga mahasiswa dapat mengakses secara pribadi dan memahami informasi-informasi penting terkait beasiswa yang didapatkannya.

Gambar 2. PowerPoint Sosialisasi Program Pemberian Beasiswa



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, 2025

Di dalam powerpoint tersebut memuat dasar hukum pelaksanaan program, visi dan misi Bupati Mojokerto, daftar universitas yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mojokerto, besaran nominal beasiswa, teknis penyaluran beasiswa, pemanfaatan beasiswa, timeline pendaftaran hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban, serta isi dari laporan pertanggungjawaban. Menurut wawancara dengan Khovifatun Nikmah, salah satu penerima beasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Mojokerto, ia mengungkapkan bahwa informasi disampaikan dengan baik, jelas, dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwasanya Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menyampaikan informasi dengan baik dan jelas sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman.

c. Konsistensi dalam menyampaikan informasi

Penyampaian informasi secara terstruktur berperan penting dalam membangun kepercayaan publik baik masyarakat, dinas terkait maupun penerima beasiswa. Konsistensi dalam implementasi program terkait dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara berkala serta informasi yang selaras di berbagai sumber. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menyampaikan informasi secara berkala melalui grup WhatsApp. Secara konsisten, tim pelaksana program menginformasikan terkait timeline pendaftaran hingga penyerahan laporan pertanggungjawaban.

Gambar 3. Grup WhatsApp Penerima Beasiswa



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, 2025

Tim pelaksana program menyampaikan waktu dan pelaksanaan kegiatan penyerahan secara simbolis jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga mahasiswa penerima beasiswa dapat menyesuaikan jadwal untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Devani Trivia Ardhani, salah satu penerima beasiswa yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, ia menyampaikan bahwa “Penyampaian informasi seperti waktu dan tempat pelaksanaan acara penyerahan secara simbolis dan penandatanganan buku tabungan di Bank Jatim, diinfokan jauh-jauh hari sehingga bisa menyesuaikan waktu dengan jadwal kuliah”. Hal ini menunjukkan konsistensi pelaksana program dalam menyampaikan informasi dengan cara tidak mendadak sehingga penerima beasiswa dapat menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Konsistensi dalam penyampaian informasi juga terlihat ketika tim pelaksana program menyampaikan waktu dan tempat penyerahan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) merupakan berkas akhir yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan rincian penggunaan dana.

Gambar 4. Penerima beasiswa menyerahkan LPJ kepada tim pelaksana program beasiswa



Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025

Bagian Kesejahteraan Rakyat mengirimkan format LPJ kepada mahasiswa penerima beasiswa di grup WhatsApp untuk memastikan penyusunan LPJ sesuai dengan ketentuan. LPJ dana beasiswa berisikan surat pengantar, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bantuan sosial beasiswa tahun anggaran 2025, rincian penggunaan dana, foto barang dan kwitansi pembayaran. Konsistensi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Penyampaian informasi secara konsisten akan mendorong terlaksananya program sesuai harapan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemberian beasiswa tersebut.

## 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya berperan penting dalam mendukung keberhasilan program. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang

diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan (Ponto dkk., 2016). Sumber daya yang kurang memadai akan menjadi hambatan dalam implementasi program. Berkaitan dengan implementasi program pemberian beasiswa, terdapat indikator-indikator yang menjadi penentu ketersediaan sumber daya yang memadai. Indikator sumber daya yakni sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

a. Sumber daya manusia

Dalam implementasi program pemberian beasiswa, sumber daya manusia yang memadai serta berkualitas akan mendukung tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan program. Menurut Widyaningrum & Salsabila dalam Hamali (2023), sumber daya manusia tidak hanya mencakup kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan, tetapi juga perasaan dan dorongan yang berperan dalam keberhasilan suatu program. Teknis pelaksanaan implementasi program pemberian beasiswa memerlukan tim pelaksana yang ahli dan kompeten. Keberhasilan program pemberian beasiswa tidak hanya ditentukan oleh individu yang memiliki keterampilan administratif dan analitis melainkan individu yang memiliki integritas dan amanah dalam menyelenggarakan seleksi dan menyerahkan beasiswa dengan jujur tanpa ada maksud maupun keinginan mengambil keuntungan pribadi. Sumber daya manusia pelaksana program pemberian beasiswa beragam jabatan maupun latar belakang pendidikan. Berikut daftar pejabat maupun staf yang menjadi bagian dari tim pelaksana program.

Tabel 1. Data Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa

No	Nama	Jabatan dalam tim	Jabatan dalam instansi
1	Drs.Teguh Gunarko, M.Si.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
2	Nunuk Djatmiko, S.Sos., M.Si.	Ketua	Kepala Bagian Kesra
3	Six Baroroh Barit, S.H.	Sekretaris	Unsur Bagian Kesra
4	Muyadi	Anggota	Unsur Bagian Kesra
5	Yuni Purwadi	Anggota	Unsur Bagian Kesra
6	Irwan Siswanto	Anggota	Unsur Bagian Kesra
7	Febrianto Al Qossam	Anggota	Unsur Bagian Kesra
8	Iwan Bagus Pratama, STP., MM.	Anggota	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
9	Wiji Santoso, S.H.	Anggota	Unsur UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Mojokerto
10	Dr. Masruchan, M.Pd.I.	Anggota	Unsur Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, 2025

Ketersediaan sumber daya manusia di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto mumpuni dalam melakukan tugas administrasi seperti pengumpulan data, verifikasi berkas pengajuan beasiswa, rekapitulasi data, dan menyusun laporan atau hasil verifikasi dan rekapitulasi data. Dalam segi kompetensi teknis, tim pelaksana program mumpuni dalam penggunaan sistem informasi untuk merekap data serta memanfaatkan platform komunikasi online untuk menyampaikan informasi.

b. Sumber daya anggaran

Anggaran (dana) menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberian beasiswa. Pentingnya ketersediaan anggaran akan memungkinkan tercukupinya kebutuhan maupun fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberian beasiswa. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas (Utami,2021). Total anggaran yang diberikan kepada penerima beasiswa sebesar Rp1.012.500.000 (satu miliar dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Seluruh biaya yang dipergunakan untuk implementasi program pemberian beasiswa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2025.

Proses penyaluran dana beasiswa dilakukan secara transparan, dana tersebut langsung masuk di rekening penerima beasiswa. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan meminimalisir tindakan penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak perantara. Miftakhul Ulum, penerima beasiswa bidang hafalan Al-Quran mengungkapkan bahwa pencairan dana tepat waktu, tepatnya satu Minggu setelah penandatanganan buku tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyalurkan dana ke penerima beasiswa, tidak mengalami keterlambatan pencairan.

Penting bagi Tim pelaksana program pemberian beasiswa menjalankan tugas dengan profesional dan integritas yang tinggi. Oleh karenanya, guna meningkatkan motivasi kinerja tim pelaksana program mendapat honorarium dengan besaran dan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/250/HK/416-012/2025 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa bagi Masyarakat Miskin Berprestasi Tahun Anggaran 2025. Pemberian insentif kepada tim pelaksana program, akan bermanfaat dalam meningkatkan motivasi kerja individu sehingga pelaksanaan program pemberian beasiswa dilakukan secara transparan, jujur, dan tepat sasaran.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang mencerminkan pemahaman, motivasi, serta keyakinan atas manfaat kebijakan tersebut (Maksum & Rahaju, 2018). Dalam konteks implementasi program pemberian beasiswa adanya sikap positif akan mendukung keberhasilan program pemberian beasiswa sedangkan sikap penolakan akan menghambat pelaksanaan program.

a. Pengangkatan Birokrasi

Dalam implementasi program pemberian beasiswa, pembentukan tim pelaksana program dilakukan dengan cara analisis kebutuhan. Anggota yang terlibat dalam tim pelaksana program adalah pejabat dari dinas-dinas yang berkaitan dengan implementasi program pemberian beasiswa ini. Adapun penugasan sub kesejahteraan sosial bagian kesejahteraan rakyat sebagai pelaksana program dikarenakan sub tersebut membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum yang mengatur pengangkatan birokrasi dalam implementasi program pemberian beasiswa yakni melalui Keputusan

---

Bupati Mojokerto Nomor 188.45/250/HK/416-012/2025 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa bagi Masyarakat Miskin Berprestasi tahun Anggaran 2025.

Adanya tim verifikasi yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program pemberian beasiswa sangat efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Terbentuknya tim verifikasi menjadikan proses administrasi berjalan dengan optimal, penyediaan informasi secara transparan, dan juga meminimalisir birokrasi yang berlebihan.

b. Insentif

Pemberian insentif kepada anggota tim pelaksana program pemberian beasiswa menjadi penting dalam rangka meningkatkan motivasi dalam bekerja. Adanya insentif akan mendorong individu untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Serta pemberian insentif akan mempertahankan tingkat akuntabilitas individu dalam bekerja. Besaran nominal serta keterangan pemberian insentif untuk tim pelaksana program terdapat dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/250/HK/416-012/2025 tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa bagi Masyarakat Miskin Berprestasi tahun anggaran 2025.

**4. Struktur Birokrasi**

Menurut Maulidia, 2017 Edward III mengidentifikasi struktur birokrasi yaitu *“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. The former develop as internal response to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”* (Edward III, 1980). Dalam implementasi program pemberian beasiswa, keberhasilan pelaksanaan program ditentukan oleh standar operasional prosedur dan fragmentasi birokrasi.

a. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur diartikan sebagai panduan yang memuat tahapan-tahapan yang rinci untuk melaksanakan suatu aktivitas. Adanya standar operasional prosedur yang terstruktur akan mendorong efektivitas dalam melaksanakan program. Dalam aspek ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto belum memiliki standar operasional prosedur yang lengkap dalam melaksanakan program pemberian beasiswa. Namun, dalam mengambil langkah, Bagian Kesejahteraan Rakyat menggunakan standar operasional prosedur di tahun 2024.

Gambar 5. Standar operasional prosedur program pemberian beasiswa

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, 2025

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Six Baroroh Barit, SH selaku sekretaris pelaksana program pemberian beasiswa menuturkan bahwasanya “standar operasional prosedur program pemberian beasiswa di tahun 2025 belum disusun secara

lengkap, sebagai pedoman maka tim pelaksana program menggunakan standar operasional prosedur di tahun lalu yaitu tahun 2024 karena standarnya sama (tidak ada perubahan)". Pentingnya pembuatan standar operasional prosedur terbaru guna penyesuaian akan perubahan yang terjadi, sehingga dapat dipastikan prosedur yang dilaksanakan tetap relevan dengan regulasi maupun teknologi terbaru.

Menurut Miftakhul Ulum, penerima beasiswa, banyaknya berkas yang harus dikumpulkan dalam pendaftaran beasiswa menjadikan proses melengkapi berkas membutuhkan waktu yang cukup lama. Khovifatun Nikmah, penerima beasiswa juga mengungkapkan bahwa terjadinya kemunduran antara tanggal pendaftaran dan penutupan, membuat pendaftar beasiswa harus berulang kali datang ke kampus untuk melengkapi berkas. Hal ini menunjukkan bahwa standar operasional prosedur dalam melaksanakan program pemberian beasiswa belum optimal.

Pentingnya inovasi digitalisasi dalam proses administrasi, seperti merancang aplikasi khusus untuk pendaftaran beasiswa akan mempermudah pendaftar beasiswa dalam melengkapi berkas. Pendaftar beasiswa tidak diharuskan melengkapi berkas pendaftaran dalam bentuk fisik, melainkan dapat dilengkapi dalam bentuk dokumen digital. Adanya inovasi akan menjadikan proses melengkapi berkas administrasi lebih efisien.

b. Fragmentasi

Fragmentasi diartikan sebagai pembagian peran dan tugas anggota tim pelaksana program. Dalam konteks implementasi program pemberian beasiswa seluruh anggota tim pelaksana program menunjukkan keterlibatan aktif mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi, seleksi hingga pelaporan pertanggungjawaban oleh penerima beasiswa. Dalam menyampaikan informasi di grup WhatsApp dilakukan oleh satu orang, hal ini dilakukan guna menjaga kejelasan serta ketertiban dalam berkoordinasi melalui platform komunikasi digital. Adapun tahapan pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penerima beasiswa dilakukan oleh seluruh anggota tim pelaksana program dari unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat. Hal ini berkaitan dengan menjaga kualitas pelayanan terhadap publik, yakni proses pelaporan dilakukan dengan mudah, jelas, dan efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto terlaksana dengan baik. Dari setiap indikator yang menunjukkan implementasi program terpenuhi dengan baik mulai dari komunikasi yang efektif dilakukan secara luring dan daring, kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan tugas administrasi serta keterampilan teknis.

Dari segi sumber daya anggaran tidak mengalami kendala, anggaran (dana) tercukupi dengan baik yakni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Dalam konteks disposisi, menunjukkan sikap positif mendukung keberhasilan pelaksanaan program, tim pelaksana program memiliki orientasi atau tujuan yang selaras dengan visi misi Bupati Mojokerto yakni memfasilitasi pendidikan di perguruan tinggi bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Pemberian honorarium untuk tim pelaksana program juga terpenuhi dengan baik sebagai bentuk motivasi untuk melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal disebabkan

---

belum tersedianya inovasi digital dalam proses administrasi. Adanya inovasi digital berupa aplikasi yang dirancang khusus untuk pendaftaran beasiswa akan memudahkan pendaftar beasiswa dalam melengkapi berkas administrasi karena berkas tidak perlu dalam bentuk berkas fisik melainkan dokumen digital. Hal ini tentunya akan menjadikan proses administrasi lebih efisien baik dari segi biaya maupun waktu.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS (Times New Roman, size 12) (Optional)**

Terima kasih kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu Bapak Nunuk Djatmiko, S.Sos., M.Si., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terkait dengan Kesejahteraan Sosial yaitu Ibu Six Baroroh Barit, S.H., Urusan kepegawaian yaitu Bapak Isyomuddin, S.E. serta seluruh staf di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan dukungan penuh serta berkontribusi dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada beberapa penerima beasiswa yang berkontribusi sebagai informan dalam penelitian ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Ainaya, C. D., & Imaningsih, N. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto. *Jambura Economic Education Journal* Volume 7 No 2 April 2025. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>.
- Ainulyaqin, MH., Sakum., Edy, S., Rakhmat, AS., Wulandari, M. (2023). Peran Program Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Pandemi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (03), 2023, 3643-3650.
- Apriliantoni & Jimale, F. A. (2023). Menjaga Akses Pendidikan yang Adil: Tantangan dan Solusi dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Al Marhalah* Volume 7 Nomor 2 November 2023.
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>.
- Hanifah, H., Salsabillah, L., Fitri, A. T., Febriani, R. M., Hidayatulloh, R., dan Harmonedi.(2025). landasan teori, penelitian relevan, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian pendidikan. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* volume 3 nomor 2 April 2025.
- Komalasari, S. D., Valentina, B. F., & Meylani, A. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 5 Nomor 2, November 2024 / Halaman 128-136.
- Lubis, M. S. I. (2020). Komunikasi Antar pribadi Guru dan Siswa dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Jurnal Network Media* Vol: 3 No.1.
- Maksum, A., & Rahaju, T. (2018). Implementasi Program Desa Melangkah Di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Publika*. <https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/View/24519%0Ahttps://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Publika/Article/Download/24519/22440>.
- Marliyah, L. (2021). Hakekat Teori dalam Riset Sosial. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship* 2 (1) (2021) 30 - 37. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jee>

- Maulidia, F. M. (2017). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (Studi di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Mediahusada*. Volume 06/ Nomor 02/ Oktober 2017.
- Mustaufa, R. (2023). Implementasi Program Beasiswa Gunungkidul Cerdas Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* Vol. 12 (2).
- NF. (2025). Pentingnya Inovasi Pendidikan untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar di Indonesia. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pentingnya-inovasi-pendidikan-untuk-meningkatkan-angka-partisipasi-kasar-di-indonesia>.
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). Kajian tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*-ISSN: 2461-0836.
- Nursulis, M., & Muspawi, M. (2024). Analisis Fungsi dan Pentingnya Landasan Teori dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*. Volume 5, Nomor 3, September 2024.
- Octavia, S., & Ramadhan, A. (2025). Data BPS: Hanya 10,2 Persen Penduduk Indonesia Lulus Perguruan Tinggi Nasional. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/04/16213201/data-bps-hanya-102-persen-penduduk-indonesia-lulus-perguruan-tinggi>.
- Ori/ris. (2025). Bupati Mojokerto Muhammad Albarra Bakal Wujudkan Visi melalui Catur Abhipraya Mubarak. <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/825725947/bupati-mojokerto-muhammad-albarraa-bakal-wujudkan-visi-melalui-catur-abhipraya-mubarak>.
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* ISSN : 2337 - 4004.
- Posangi, H. A., Lengkong, F. D. J., & Dengo, S. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Purnamasari, G. N., & Ardiansyah, H. (2025). Kajian Literatur tentang Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025.
- Sahir. (2022). Metodologi Penelitian. *Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia*.
- Subakti, M. A., & Rahaju, T. (2025). Implementasi Program Sistem Informasi Desa Siap (Opensid) di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025.
- Sundari., A'yuni, D. S., & Prahara, R. S. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 6 No. 4, 2023.
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *JISPAR Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Volume 10 issue 1.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Halaman 2896-2910 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023.
- Widyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024). Implementasi Program Beasiswa TI Bupati
-

(BESTI) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 10, Nomor 4, November 2024.